

PERDEBATAN TEORITIS MENGENAI *CIVIL SOCIETY* DI NEGARA-NEGARA ASIA

Endang Sriningsih
Politeknik Sakti Surabaya
e_sriningsih@yahoo.com

ABSTRAK

Di Asia, Civil society merupakan sebuah diskursus lama dan sekaligus baru. Dikatakan lama, karena jauh sebelum terminologi Civil society populer di kawasan Asia, masyarakat Asia sesungguhnya telah akrab bersentuhan dengan aneka bentuk asosiasi atau organisasi sosial, seperti keluarga, pers, keagamaan, dagang, sekolah, antara lain, yang muncul dan berkembang di luar negara (non-state organization). Dikatakan baru, karena sebenarnya masyarakat negara-negara Asia secara formal baru bersentuhan dengan terminologi civil society, yang lahir dari peradaban Barat, sekitar dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Pada tahun-tahun tersebut, masyarakat di negara-negara Asia mulai mengenal dan sekaligus mereproduksi Civil society tidak sebatas sebagai wacana (discourse), melainkan sekaligus sebagai paradigma gerakan sosial (social movement) dalam melakukan perlawanan vis a vis dengan negara (state) yang kebanyakan dimonopoli oleh rezim oligarki. Dalam dinamikanya, perkembangan Civil society di Asia menunjukkan fenomena yang unik dan sekaligus kompleks, karena Civil society yang diartikulasikan oleh warga masyarakat di negara-negara Asia tidaklah sama persis dengan ekspresi Civil society di negara-negara Barat dan Amerika Latin. Konteks sosial, politik, dan budaya dapat diidentifikasi menjadi variable yang turut mengkonstruksi perbedaan tersebut. Tulisan ini bermaksud menggali lebih jauh tentang apa dan bagaimana perdebatan teoritis mengenai Civil society di Asia.

Kata kunci : teori civil society, negara-negara Asia

PENDAHULUAN

Civil society menjadi perbincangan, baik sebagai gagasan maupun gerakan sosial, mencuat seiring dengan maraknya gelombang

demokratisasi yang melanda belahan dunia pada periode 1970-an. Dimulai dari Eropa Selatan (Spanyol, Portugal, dan Yunani) pada pertengahan 1970-an, Amerika Tengah dan Latin (Brazil, Argentina, Cile, Uruguay, Peru, Ekuador, Bolivia, Paraguay, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Guatemala, Mexico dan lain-lain) pada awal 1980-an, dan Eropa Timur (Polandia, Hungaria, Czechoslovakia, Rumania, Bulgaria, dan bekas Jerman Timur) pada awal 1990-an. Inilah fenomena yang oleh Samuel P. Huntington disebut-sebut sebagai “demokrasi gelombang ketiga” (*the Third Wave of democracy*) di mana antara tahun 1974 sampai 1990, setidaknya 30 negara mengalami transisi dari rezim otoritarian dan komunis ke demokrasi¹.

Sedangkan negara-negara Asia secara formal baru bersentuhan dengan *Civil society* sekitar dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Hampir semua ahli sependapat bahwa gagasan mengenai *Civil society* lahir di Eropa pada 1970-an. Dalam hal ini, Eropa bukan hanya sekedar menunjukkan tempat geografis, tetapi kenyataan ini juga merujuk pada aspek sosial-budaya, ekonomi dan politik yang bukan tidak mustahil membentuk dan mempengaruhi bangunan *Civil society* itu sendiri. Karenanya, seperti dinyatakan oleh seorang Sosiolog Turki Serif Mardin, *Civil society* itu impian Barat. Baginya *Civil society* berkaitan dengan aspirasi sejarah atau bagian dari sejarah sosial masyarakat Barat. Karenanya, gagasan *Civil society* secara keseluruhan belum tentu bisa dikembangkan pada situasi kemasyarakatan lain. Meskipun demikian, bukan berarti pula gagasan *Civil society* yang berakar dari tradisi Barat tidak bisa dikembangkan di tempat lain, tentunya dengan beberapa penyesuaian². Pada periode ini, masyarakat di negara-negara Asia mulai mengonsumsi dan sekaligus mereproduksi *Civil society* tidak sebatas sebagai wacana (*discourse*), melainkan sekaligus juga sebagai paradigma gerakan sosial (*social movement*) dalam melakukan perlawanan secara *vis a vis* dengan negara (*state*) yang kebanyakan dimonopoli oleh rezim otoritarianisme.

¹ Baca Samuel P. Huntington, *Democracy's Third Wave*, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed.) *The Global Resurgence of Democracy*, Baltimore and London: The Johns ty Press, 2004, hlm., 3.

² Baca Serif Mardin, *Civil Society and Islam*, dalam John A. Hall (ed.) *Civil Society: Theory, History, Comparison*, hlm., 278.

Di Philipina muncul gerakan *people power* atau revolusi EDSA yang dilakukan afiliasi buruh, petani, mahasiswa, dan gereja, dalam rangka melakukan perlawanan terhadap rezim otoritarianisme Marcos (1986), di Indonesia lahir gerakan reformasi yang digalang oleh afiliasi mahasiswa, buruh, petani, dan elit agama, melawan rezim otoritarianisme Soeharto dengan Orde Baru-nya (1998), di Korea Selatan lahir pula gerakan oposisional yang beraliansi dengan elemen *Civil society* dalam perjuangannya mendelegitimasi rezim otoritarianisme (1987). Demikian pula halnya dengan fenomena *Civil society* di beberapa negara Asia lainnya seperti India, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Sri Lanka, Jepang dan Cina, dan sebagai perkecualian adalah Korea Utara yang sampai sekarang fenomena *Civil society* nyaris tidak mendapat ruang gerak.

Dalam dinamikanya, perkembangan *Civil society* di Asia menunjukkan fenomena yang unik dan sekaligus kompleks. Dikatakan demikian, karena *Civil society* yang diartikulasikan oleh warga masyarakat di negara-negara Asia tidaklah sama persis dengan ekspresi *Civil society* di negara-negara Barat. Tentunya, apa yang diimajinasikan oleh masyarakat Barat dengan paradigma *civil society*-nya, tidak disangsikan, akan berbeda dengan apa yang diimajinasikan oleh masyarakat di negara-negara Asia yang mengadopsi paradigma tersebut. Konteks sosial, politik, budaya dan lainnya dapat diidentifikasi menjadi variabel yang turut mengkonstruksi perbedaan tersebut. Satu hal yang menarik, sebagaimana dikemukakan Muthiah Alagappa dalam bukunya "*Civil society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Spehre*", dinamika *Civil society* di negara-negara Asia, memunculkan ekspresi yang beragam dari waktu ke waktu. *Civil society* di Asia –agak berbeda dengan *Civil society* di Eropa dan Amerika— menampilkan karakter yang tidak monoton, kadang sangat kritis, reaktif, radikal, dan militan dalam memosisikan diri *Vis a Vis* dengan negara (*state*), namun kerap pula, ia memosisikan diri bergandengan tangan dengan negara³.

A. Diskursus Teoritik *Civil Society*

Diskursus mengenai *Civil society* tidak pernah melahirkan satu konsepsi yang tunggal. Konsep *Civil society* di Eropa abad 19 dan 20

³ Edward Aspinall, *Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change.....*, hlm., 73-85.

muncul dalam konteks pembangunan ruang komersial dan negara modern. Hegel dan para pemikir abad pencerahan memahami *Civil society* sebagai pembangunan yang membawa dampak positif. Ia mengonseptualisasikan *Civil society* sebagai ruang (*space*) bagi relasi-relasi pasar, yang diatur oleh hukum sipil, yang menjembatani antara keluarga dan negara, yang dipergunakan oleh warga sebagai ruang untuk mencapai pemuasan kepentingan individu dan kelompok. Ia tersusun dari elemen-elemen keluarga, korporasi/ asosiasi, dan aparat administrasi/ legal. Karena berada pada posisi antara, maka *Civil society* belum mampu melakukan kontrol dan mengatasi konflik internal melalui politik. Kemampuan politik itu hanya dimiliki oleh negara, sebagai entitas penjelamaan ide universal dan karena itu posisinya, secara logis mengatasi dan mengontrol *civil society*⁴.

Sedangkan Marx memahami *Civil society* sebagai arena alienasi dan eksploitasi yang untuk mengatasinya tidak ada jalan lain kecuali melalui revolusi. Sambil tetap mempertahankan konsep *Civil society* sebagai *buergerliche gesellschaft*, Marx mereduksinya dalam konteks hubungan produksi kapitalis, sehingga *Civil society* adalah kelas borjuis itu sendiri. Akibatnya, berbeda dengan Hegel, Marx menganggap *Civil society* pun sebagai kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Hapusnya *Civil society* jadinya merupakan tahapan yang harus ada bagi munculnya masyarakat tak berkelas⁵.

Sementara, Antonio Gramsci, dengan meminjam kategorisasi Marxis, merumuskan konsep *Civil society* yang justru berbeda dari rumusan Marx. Perbedaan antara Gramsci dengan Marx, Gramsci sebatas memberikan penafsiran terhadap *Civil society* dari sisi ideologis (superstruktur), sedangkan Marx melihatnya dari relasi produksi (basis material). Karena itu, konsep Gramsci sebenarnya lebih dinamis karena dalam momen hegemoni tersebut selalu terbuka kemungkinan *counter-hegemoni* dari kekuatan di luar negara. Gramsci menyebut adanya “kesadaran berlawanan” (*contradictory consciousness*) dalam setiap momen hegemoni yang membuka

⁴ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change*....., hlm., 27-30; Arif Budiman (ed.) *State and Civil Society in Indonesia*, Monash University: Centre of Southeast Asian Studies, 1990, hlm., 4.

⁵ Arif Budiman (ed.) *State and Civil Society*....., hlm., 4; Martti Muukkonen, *Framing the Field: Civil Society and Related Concepts*, dalam *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 2009, 38, Sage Publication, hlm., 687.

peluang bagi perlawanan atasnya.⁶ Dengan membuat perbedaan antara negara dan *civil society*, Gramsci menekankan peran penting dukungan ideologi dan budaya yang disediakan oleh *Civil society* untuk mempertahankan diri dari kapitalisme Eropa. Menurut Gramsci, hegemoni kapitalisme itu tidak saja berwujud dalam bentuk material dan kekerasan fisik, tetapi juga didasarkan pada ukuran-ukuran konsensus, kerjasama, kolaborasi yang isunya bersumber dari dukungan ideologi dan budaya⁷. Dengan kata lain, *Civil society* dalam pandangan Gramsci, merupakan arena bagi pagelaran hegemoni di luar kekuatan negara yang disebutnya dengan *political society*. Melalui *Civil society* itulah aparat hegemoni beroperasi mengembangkan hegemoni untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat. Dengan demikian *Civil society* lebih merupakan momen moral dari kekuatan dominan, sementara negara merupakan momen politisnya⁸.

Sementara itu, Alexis de Tocqueville memandang *Civil society* sebagai kekuatan positif dalam menindaklanjuti demokrasi dengan catatan tercipta suatu kondisi kesamaan sosial dan saat bersamaan pemerintah pusat mengalami penurunan. *Civil society* dipahami pula sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara. Di sini ia menekankan kesinambungan antara asosiasi dengan demokrasi, atau dalam terminologi kontemporer hubungan antara *Civil society* dengan demokrasi.

Partisipasi dalam kelompok sosial dinilai mampu menghasilkan modal sosial (*social capital*) yang cukup vital bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa *Civil society* yang kuat merupakan prasyarat bagi demokrasi yang efektif⁹.

⁶ Muhammad AS Hikam, *Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm., 118.

⁷ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change.....*, hlm., 27-30.

⁸ Lebih lanjut baca Antonio Gramsci, *The Selections From the Prison Notebooks*, London: Lawrence and Wishart, 1971.

⁹ Konsepsi mengenai *civil society* sebagaimana dikemukakan di atas sebenarnya telah bergerak jauh dari asal usulnya yakni dalam filsafat Barat, menuju ke Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa Timur, Tengah dan Barat, Afrika dan tidak ketinggalan Asia. Pada permulaan 1980-an perdebatan mengenai *civil society* dibatasi pada sejarah ide-ide dalam filsafat politik Barat. Namun, seiring dengan gelombang kebangkitan ketiga gelombang demokratisasi, terutama sejak masuknya ruang publik sebagai salah satu legitimasi bagi negara-negara Eropa Timur dan Tengah Post-Soviet (Polandia, Ceko dan Hungaria), diskusi mengenai hubungan

Apabila diperhatikan, konsepsi Tocqueville, yang dikembangkannya berdasarkan pengalaman Amerika, sepintas lebih dekat dengan konsep Hegel yang memandang *Civil society* sebagai gejala sosial dalam masyarakat modern. Namun jika diperhatikan seksama ia berbeda dengan Hegel. Menurut Tocqueville posisi *Civil society* tidak apriori subordinatif terhadap negara. *Civil society* dalam dirinya memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara. *Civil society* yang dimengerti sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan dan kemandirian berhadapan dengan negara, justru merupakan sumber legitimasi keberadaan negara kendatipun tidak sepenuhnya mengontrol yang terakhir. Sebab bagaimanapun juga negara memiliki kapasitas berbeda dan lebih bersifat inklusif. Sementara *civil society*, dalam dirinya cenderung pluralistis sehingga eksklusivisme senantiasa membayangnya¹⁰.

Apabila dicermati, setidaknya terdapat empat aspek penting yang terkandung dalam pengertian *Civil society* di atas, yaitu: *pertama*, adanya ruang publik bagi organisasi yang berasal dari institusi non-negara, kelompok-kelompok non-pasar. Dalam hal ini *Civil society* mencakup baik organisasi *voluntary* maupun organisasi non-*voluntary* yang mendiami tempat yang terletak di antara negara, masyarakat politik (*political society*), pasar, dan masyarakat pada umumnya, dan mengambil tindakan kolektif guna mengejar kepentingan publik¹¹. *Kedua*, sebuah ruang bagi komunikasi dan diskursus publik. *Civil*

antara individu, masyarakat, negara dan pasar kian marak. Demikian juga halnya dengan perdebatan mengenai *civil society* dan posisinya dalam politik. *Civil society* juga mulai masuk dalam diskursus pengambil kebijakan, intelektual, jurnalis, NGOs. Menyikapi kondisi ini, John Keane mengatakan bahwa “ini merupakan tanda bagi berakhirnya abad panjang dari pemikiran politik yang selama ini didominasi oleh ideologi statis” lalu muncullah kebangkitan *civil society*, lahir kembali dalam skala luas, menempati posisi sentral dalam pemikiran politik kontemporer. Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change.....*, hlm., 26-31.

¹⁰ Martti Muukkonen, *Framing the Field: Civil Society and Related Concepts*, dalam *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 2009, 38, Sage Publication, hlm., 687; Muhammad AS Hikam, *Islam, Demokratisasi.....*, hlm., 118-119.

¹¹ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change.....*, hlm., 9; Rollin F. Tusalem, *A Boon or a Bane ? The Role of Civil Society in Third- and Fourth-Wave Democracies*, dalam *International Political Science Review*, 2007; 28; Sage Publication, hlm., 363-364.

society adalah sebuah ruang yang nyata-nyata dipergunakan untuk memperjuangkan hak-hak sipil, diskursus politik, refleksi kritis dan pembentukan keadaan ideal-normatif melalui interaksi yang didasarkan pada ide-ide dan argumentasi. *Ketiga*, sebuah ruang bagi pemerintahan. Aspek ketiga ini mengidentifikasi *Civil society* sebagai sebuah ruang penting untuk pemerintahan sendiri yang bebas dari campur tangan negara. *Keempat*, sebuah cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi struktur dan aturan-aturan permainan politik. Aspek terakhir ini menggambarkan atensi terhadap peran tindakan kolektif dari organisasi *Civil society* dalam membentuk, memproteksi, dan memperluas ruang publik, memiliki kemampuan dalam membatasi diri dari kekuasaan negara, menciptakan tuntutan-tuntutan publik kepada negara, mempengaruhi sistem politik dan menstrukturasi hubungan-hubungan di antara para aktor dalam ranah yang berbeda. Penting dicatat di sini bahwa *Civil society* itu bukanlah sebuah kekuatan monolitik, melainkan kelompok dari aktor-aktor yang berbeda-beda yang memiliki kepentingan untuk memperluas spektrum¹².

Sementara itu, Jean L. Cohen dan Andrew Arato memahami *Civil society* sebagai ruang interaksi sosial bagi ekonomi dan negara yang terdiri dari lembaga-lembaga yang sangat dekat, seperti keluarga, organisasi-organisasi sukarela, gerakan sosial, dan bentuk-bentuk komunikasi publik¹³. Namun demikian, dengan menggunakan Polandia sebagai contoh kasus, Cohen dan Arato menekankan *Civil society* bukan hanya sesuatu yang berada di luar, tetapi juga sebagai lawan atas negara. Bahkan posisi sebagai lawan negara inilah yang menjadi pemicu gagasan mengenai *Civil society* secara dramatik. Disebutkan "*the opposition of Civil society and state made its most dramatic return in Eastern Europe, particularly in ideology of the polish opposition from 1976 to the advent of the early solidarity and beyond*". Slogan-slogan perlawanan yang digunakan oleh solidaritas mencerminkan hal ini, seperti: masyarakat lawan negara, bangsa lawan negara, tatanan sosial lawan sistem politik, *pays real against*

¹² Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change*....., hlm., 9; Anders Uhlin, *Which Characteristics of Civil Society Organizations Support What Aspects of Democracy ? Evidence from Post-Communist Latvia*, dalam *International Political Science Review*, 2009; 30; Sage Publication, hlm., 273-274.

¹³ Jean L. Cohen and Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge, Mass: MIT Press, 1992, hlm., ix.

pays legal or official, kehidupan publik lawan negara, kehidupan privat lawan kekuatan publik, dan sebagainya¹⁴. Jadi jelaslah bahwa di negara-negara di mana situasinya relatif berbeda dengan Eropa Timur, khususnya Polandia, bangunan *Civil society* bisa berbeda pula.

Di kawasan Asia Pasifik, Muthiah Alagappa menggambarkan munculnya *Civil society* dikaitkan erat dengan tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat. Siapa pun tahu bahwa tidak semua, bahkan mungkin juga tidak ada, lembaga swadaya masyarakat di Asia itu mempunyai kesepadanan ideologis dengan Solidaritas pimpinan Lech Walesa. Sampai tingkat tertentu, lembaga-lembaga swadaya tersebut tidak berfungsi sebagai ancaman terhadap negara. Bahkan, banyak lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai program kerja yang bersifat suplemen atau komplementer dengan program kerja negara¹⁵.

Walaupun demikian, mesti harus tetap diakui bahwa gagasan mengenai *Civil society* juga mencakup ide tentang perlunya ruang publik yang tidak didominasi atau dikontrol oleh negara, sebagaimana ditegaskan Muthiah Alagappa. Pandangan ini sebanding dengan apa yang dipikirkan Ernest Gellner tentang *Civil society* di mana ia menegaskan bahwa *Civil society* mempunyai fungsi “*to counterbalance the state*” dan menjaga agar negara tidak mendominasi atau melakukan atomisasi kepada masyarakat¹⁶.

B. Peran *Civil society* dalam Memperluas Ruang Demokrasi di Beberapa Negara Asia

Tulisan ini akan membahas peran *Civil society* dalam memperluas ruang demokrasi di negara-negara Asia yang *Civil society* nya dikategorikan telah memiliki legitimasi yang kuat antara lain Indonesia, Philipina, dan Korea Selatan. Keberadaan *Civil society* di

¹⁴ Jean L. Cohen and Andrew Arato, *Civil Society*, hlm., 31.

¹⁵ Sebagai contoh, baca Tadashi Yamamoto (ed.), *Emerging Civil Society in the Asia Pasific Community*, Singapore: ISEAS, 1996; Philip J. Eldrige, *Non-Goverment Organizations and Democratic Participation in Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995.

¹⁶ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change*....., hlm., 9; Ernest Gellner, *The Importance of Being Modular*, dalam John A. Hall (ed.), *Civil Society, Theory, History, Comparison*, hlm., 32.

negara-negara Asia membawa dampak positif sekaligus negative bagi pembangunan demokrasi. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pengalaman dan eksperimentasi gerak *Civil society* dalam membangun ruang demokrasi di negara-negara dunia ketiga tersebut.

1. *Civil society* dan Perubahan Politik di Indonesia

Edward Aspinal¹⁷ mengkaji pengalaman Indonesia, menggambarkan dinamika *Civil society* relasinya dengan negara dalam membuka ruang demokrasi pada era orde lama, orde baru, dan sekilas perkembangannya pada era pasca Orde Baru, atau dikenal pula dengan sebutan era reformasi memang penting, namun demikian kehadirannya tidak senantiasa mensupport demokrasi.

a. **Era Orde Lama:** Menjamurnya *Civil society* bukan jaminan bagi demokrasi

Pada Era Orde Lama, periode 1950 sampai 1960-an, Indonesia dicirikan oleh kehidupan asosiasional. Pada era tersebut berbagai asosiasi *Civil society* dan organisasi tumbuh pesat. Tetapi disayangkan bahwa kehidupan aneka organisasi dan asosiasi tersebut dimobilisasi dan dipolitisasi sehingga mengakibatkan terjadinya polarisasi yang cukup tajam. Sebagaimana digambarkan para ahli bahwa kehidupan asosiasional masyarakat Indonesia saat itu terpolarisasi kedalam politik *aliran*¹⁸. Pada masa itu hampir tidak ada organisasi *Civil society* yang tidak berafiliasi dengan partai-partai politik, terutama Partai Nasionalis, Partai Islam, Partai Komunis, yang semuanya jelas berorientasi pada perebutan kekuasaan.

¹⁷ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough*, dalam Mutiah Alagapa (ed.) *Civil Society and Change in Asia*, hlm.63.

¹⁸ Istilah politik aliran, kali pertama diperkenalkan oleh Clifford Greetz, ketika mengamati perpolitikan di Indonesia pasca-kemerdekaan, dengan membandingkan dengan apa yang diamatinya di negeri Belanda, yang dikenal sebagai *Veruilen/Verzuiling*. Aliran yang merupakan sebuah metafora dari kenyataan kehidupan sosial-politik di Indonesia pada masa pasca perang kemerdekaan partai politik melakukan mobilisasi massa dengan membentuk sejumlah *auxiliary organization* dalam rangka memenangkan Pemilu 1955. Baca Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm.125.

Maka terjadilah konflik yang luar biasa antar *Civil society* dan juga antara *Civil society* dengan negara. *Civil society* saat itu sering hanya dijadikan kendaraan, bukan untuk melahirkan keadaban (*civility*) dan modal sosial (*social capital*). Keadaan itu memicu daya tarik dalam konflik sosio-politik yang melibatkan massa sampai akar rumput. Keberadaan *Civil society* dalam era Demokrasi Terpimpin itu justru banyak mendatangkan mudharat, tidak mendorong perubahan politik yang lebih demokratis, tetapi justru *Civil society* pada masa itu berperan merontokkan pilar-pilar demokrasi (*declaine democracy*).¹⁹

Indonesia di bawah rezim Orde Lama pada periode 1950-an dan 1960-an diwarnai konflik antar dan intern *Civil society* yang disertai kekerasan yang dasyat yang pada gilirannya melibatkan pula rezim negara, yang kemudian memedarkan konflik yang bercorak horizontal maupun vertikal. Pertentangan antara petani miskin (*landless*) yang kebanyakan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan tuan tanah (*landlord*) yang kebanyakan terdiri dari para kyai atau santri yang berafiliasi dengan NU, telah menyeret keterlibatan militer yang mem-*back up* kaum santri. Dalam konflik tersebut, PKI dengan BTI membuat slogan “perang melawan tujuh setan desa (*seven village devils*), termasuk di dalamnya kyai”. Tak kalah serunya, para kyai atau santri meng-*counter*-nya dengan “jihad melawan ateis dan komunis”²⁰. Tercatat, konflik antar elemen *Civil society* yang melibatkan peran militer telah melahirkan pembunuhan besar-besaran baik yang dilakukan kalangan komunis terhadap santri, ataupun yang dilakukan santri dengan dukungan militer terhadap kalangan komunis. Pada September sampai dengan Oktober 1965, PKI telah melancarkan kudeta dengan menculik dan membunuh enam jenderal senior, saat bermasaan militer dan NU juga melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap PKI beserta simpatisannya. Tercatat sebanyak 500.000 sampai satu juta orang kebanyakan adalah anggota dan simpatisan PKI dibunuh. Konflik yang mencapai puncaknya pada peristiwa 1965-1966 inilah yang melahirkan perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru yang ditandai oleh naiknya rezim Soeharto²¹.

¹⁹ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation*....., hlm.62-63

²⁰ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation*....., hlm., 67-68.

²¹ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation* , hlm., 68-69.

b. **Era Orde Baru** : *Civil society* Ditekan, *Civil society* Bertahan, dan *Civil society* Melawan

Lahirnya era Orde Baru dengan Soeharto tampil sebagai presiden RI tidak bisa dilepaskan dari penggalan kelam sejarah pertikaian politik *aliran* yang diwarnai kekerasan. Seiring dengan naiknya Soeharto, maka gerbong militerlah yang menguasai pemerintahan dan selanjutnya memotong mata rantai politik *aliran* dan menyusun konsensus sosial dan politik dengan pendekatan kekerasan. Kepemimpinan militer, sebagaimana digambarkan oleh Richard Tanter, sebagai *totaliran ambitions*. Dalam konteks ini, militer yang menguasai negara berambisi untuk memperkuat dan memperluas kontrol negara atas kehidupan sosial. Hal ini dilakukan Orde Baru lebih dikarenakan khawatir memori konflik berdarah-darah sebagaimana peristiwa kemanusiaan 1965-1966²².

Pada era Orde Baru, *Civil society* dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu, *pertama*, organisasi tunggal berbadan hukum, seperti organisasi petani yang tergabung dalam HKTI (Himpunan Kerukunan Petani Indonesia). HKTI ini merupakan organisasi yang memiliki ketergantungan kepada pemerintah dan sekaligus memiliki afiliasi dengan Golkar. *Kedua*, organisasi semi berbadan hukum (*semicorporist*), sebuah organisasi yang independen dalam asal usul dan aspirasinya, namun berkompromi dengan negara agar bisa *survive*. Masuk dalam lingkaran organisasi ini antara lain NU dan Muhammadiyah. *Ketiga*, organisasi *Civil society* proto-oposisional, yakni organisasi yang memiliki kemandirian besar dari intervensi negara, namun sesekali mengadopsi pendirian kritis terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan negara. Termasuk dalam kategori ini antara lain adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam reformasi hukum (LBH), perlindungan lingkungan, dan pembangunan alternatif bagi komunitas tertentu²³.

Sementara itu, kehidupan asosiasional selama era Orde Baru ditandai oleh dua kecenderungan penting. Pertama, semakin kaburnya batasan-batasan antara negara dan *civil society*. Kekaburan ini merupakan produk dari peran sentral negara

²² Edward Aspinal, *Indonesia Transformation*....., hlm., 71.

²³ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation*....., hlm., 71-72.

dalam menciptakan restrukturisasi kehidupan sipil serta intervensi negara terhadap organisasi legal. Sebagai hasilnya, tantangan terhadap Orde Baru dicirikan oleh apa yang X.L. Ding gambarkan sebagai “*institutional amphibiousness*”, di mana institusi-institusi resmi atau semi resmi dimanfaatkan untuk tujuan melakukan *counter* terhadap tujuan yang dimiliki institusi-institusi tersebut. Contoh yang paling nyata, pada permulaan 1990-an, ada upaya dari kelompok Islam modernis yang hendak mengkolonisasi negara dari dalam melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dinahkodai oleh B.J. Habibie dan juga atas sponsor dari Soeharto sendiri²⁴.

Ciri kedua dari *Civil society* era Orde Baru adalah karakternya yang dapat dibilang defensif. Tidak banyak NGO ataupun elemen *Civil society* dihadapkan pada rezim Orde Baru yang sangat represif yang terang-terangan melakukan kontrol apalagi resitensi terhadap rezim negara. Sikap defensif semacam ini juga ditunjukkan secara jelas oleh NU. Sejak 1970-an, NU dikenal sebagai organisasi yang memiliki hubungan yang kerap berseberangan dengan negara yang dinilai telah melakukan represi terhadap kehidupan umat Islam. Pada 1984, organisasi ini menunjukkan perubahan dalam membangun relasi dengan pemerintah. Terlebih lagi saat itu NU menjadi organisasi pelopor yang menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Hubungan antara NU dengan negara pun kian mencair dan menunjukkan kedekatannya. Konsekuensinya, Negara pun lebih perhatian dan banyak mengalokasikan program pembangunannya ke pesantren NU²⁵.

Pada akhir 1990-an, *Civil society* secara institusional dapat dikatakan kian melemah. Beragam elemen *Civil society* memiliki pandangan yang berbeda mengenai masyarakat yang ideal. Sebagai konsekuensinya, kelompok-kelompok tersebut menetapkan tujuan dan langkah-langkah perjuangan yang berbeda-beda pula. Tidak sebatas itu, kelompok-kelompok *Civil society* pada periode ini juga sangat tergantung dengan founding

²⁴ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation*....., hlm., 72-73.

²⁵ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation*....., hlm., 73-74.

dari luar maupun *supporting* dari negara guna mempertahankan eksistensinya²⁶.

Namun demikian, satu hal yang penting dicatat adalah bahwa represi rezim otoritarianisme Orde Baru dalam jangka panjang, tidak serta merta dapat melumpuhkan atau membuat tiarap kekuatan *civil society*. Tekanan yang besar dalam momentum tertentu telah memunculkan ledakan massa dalam melakukan perlawanan terhadap rezim negara otoriter. Gerakan reformasi 1998 yang ada di Indonesia yang berhasil menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru merepresentasikan persoalan tersebut.

2. *Civil society* dan Perubahan Politik di Philipina

Perkembangan *Civil society* di Philipina tidak dapat dipisahkan dari *people power* atau revolusi EDSA (*Evanigno De Los Santos Aveue*)²⁷. Sebab, gerakan revolusi massa inilah yang berhasil menciptakan perubahan politik yang ditandai oleh tumbangnya rezim otoritarianisme Marcos, dan munculnya era transisi demokrasi. *People Power* di Philipina ditengarai berdampak luas dan sekaligus memberi inspirasi terhadap munculnya gerakan serupa dalam menumbangkan rezim otoritarianisme di Asia, termasuk Indonesia dalam gerakan reformasi 1998.

Fenomena *Civil society* di Philipina sebenarnya telah lama tumbuh dan berkembang sebelum revolusi EDSA, mereka terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, kaum buruh, petani, nelayan, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Namun demikian gerakan *Civil society* ditekan sehingga tidak mempunyai cukup ruang untuk mengartikulasikan perlawanan karena begitu kuatnya kediktatoran Marcos yang hegemonik. Banyak elemen *Civil society* yang belum cukup kuat dan tersendat oleh perbedaan imajinasi mengenai masa

²⁶ Edward Aspinal, *Indonesia Transformation.....*, hlm., 74-77.

²⁷ EDSA merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya elemen *civil society* dalam melancarkan gerakan kontra rezim dictator Marcos.

depan demokrasi di Philipina, memilih untuk tiarap daripada berhadap-hdapan secara *vis a vis* dengan negara²⁸.

a. Revolusi EDSA 1

Pemerintahan diktator Marcos berlangsung selama 20 lebih tahun diwarnai dengan sistem pemerintahan yang hegemonik dengan karakter utama yang dominative, represif dan eksploitatif, dan tidak memberikan kebebasan berpendapat. Politik represif berhasil menciptakan kepatuhan, ketundukan, dan menekan setiap gerakan kontra pemerintah. Di sisi lain tindakan represif tidak selamanya mampu menciptakan kepatuhan, tetapi sebaliknya dapat melahirkan gerakan kontra-hegemoni. Situasi sosial politik inilah yang oleh banyak pihak diidentifikasi menjadi konteks bagi kemunculan gerakan *people power* yang dimotori kekuatan *Civil society* 1980-an.²⁹

Peristiwa ini bermula dari pembunuhan terhadap Benigno Aquino (1983), diikuti kemudian dengan demonstrasi besar-besaran di Manila (1983-1986) yang dimotori antara lain oleh Corazon Aquino yang menentang kediktatoran Marcos. Pada November 1985 Marcos mengumumkan pemilu sela yang akan dilaksanakan pada 1986. Pemilu berhasil dilaksanakan, tetapi muncul gelombang protes terhadap kecurangan manipulasi suara oleh kubu Marcos. Jenderal Fidel Ramos Wakil Staf Angkatan Bersenjata Philipina dan Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrille membelot, dan menyatakan bahwa pemenang pemilu sebenarnya adalah Corazon Aquino³⁰.

Saat itulah, Jaime Kardinal Sin lewat radio Veritas meminta umatnya untuk melindungi petinggi militer tersebut. Ribuan orang terdiri dari massa rakyat dari berbagai lapisan, elit politik, kelas menengah, kalangan bisnis, mahasiswa, buruh, dan elit agama (Gereja Katolik) turun ke jalan memenuhi Epifano de Dos Santos Avenue (EDSA) untuk melakukan perlawanan terhadap kediktatoran Marcos. Gerakan *people power* yang disebut-sebut

²⁸ Jenifer C. Franco, *The Philipines, Factious Civil Society and Compening Visions of Democracy*, dalam Mutiah Alagappa, *Civil Society and Political Change*, hlm.99-102

²⁹ Jenifer C. Franco, *The Philipines, Factious Civil Society and Compening Visions of Democracy*...hlm.106-109.

³⁰ Jenifer C. Franco, *The Philipines, Factious Civil Society and Compening Visions of Democracy*....hlm 109 - 111

sebagai revolusi EDSA inilah yang berhasil memaksa Marcos turun dari kursi kepresidenan.

b. Revolusi EDSA 2

Keberhasilan *people power* dalam revolusi EDSA 1 dalam menumbangkan rezim otoritarianisme tidak serta merta memberi jaminan terhadap terbangunnya sistem kehidupan sosial politik yang betul-betul demokratis. Pada masa pemerintahan Corazon Aquino ini pula sesungguhnya elemen-elemen *Civil society* dalam mengawal pemerintahan yang demokratis telah terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok. Mereka tidak memiliki pandangan dan kepentingan sama terkait dengan pembangunan demokrasi, yang kemudian memicu konflik kepentingan di antara elemen *civil society*³¹.

Kondisi sosial-politik Philipina terus mengalami kemerosotan seiring dengan kemenangan Estrada dalam pemilu. Era pemerintahan Estrada dapat dikatakan mengalami kemunduran, kembali ke jalur otoritarianisme. Masyarakat mulai melakukan protes terhadap sistem perpolitikan pemerintahan Estrada yang tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Gerakan *people power* jilid 2 yang dipelopori *Civil society* bangkit kembali. Gerakan *people power* ini akhirnya berhasil menumbangkan rezim Estrada, dan melahirkan pemimpin baru Gloria Macapagal Arroyo lewat pemilu³²

Dinamika perkembangan *Civil society* berikutnya di Philipina mengalami pasang surut, dalam membangun *power relation* dengan negara ataupun dalam agenda perubahan politik, hampir seperti di Indonesia. Awal pemerintahan Arroyo masih dinilai demokratis, tetapi kemudian nampak adanya isu-isu korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai mewarnai pemerintahan Arroyo. Hal ini memicu munculnya gerakan *people power* jilid 3. Namun, masyarakat Philipina nampaknya mulai jenuh dengan gerakan *people power*. Mereka mempertanyakan akankah perubahan politik di Philipina selalu dilakukan dengan cara-cara gerakan *people power*?

³¹ Jenifer C. Franco, *The Philipines, Factious Civil Society and Compening Visions of Democracy*....hlm 109 – 111

³² Jenifer C. Franco, *The Philipines, Factious Civil Society and Compening Visions of Democracy*....hlm 109 - 111

3. **Civil society dan Perubahan Politik di Korea Selatan**

Fenomena gerakan *Civil society* di negara Korea Selatan ini sudah muncul pada tahun 1948, yaitu tiga tahun setelah Korea bebas dari onialisme Jepang. Negara ini memasuki fase demokrasi liberal. Elemen-elemen demokrasi Liberal-seperti adanya konstitusi, pemisahan pemerintahan (legislative, Yudikatif, dan eksekutif), pemilu, partai politik, kelompok kepentingan, media – semuanya sudah ada pada permulaan republic. Periode berikutnya, terutama 1980-an, secara berturut-turut, Korea Selatan mengalami dinamika perubahan politik dari liberal demokratik menuju sistem pemerintahan otoritarian, dan kembali berhasil menciptakan perubahan politik kearah yang lebih demokratis.³³

a. **Gerakan *Civil society* dan Perubahan Politik dalam Sejarah Korea Selatan**

Gerakan *Civil society* di Korea Selatan dapat dilacak dari sejarah sejak periode kolonialisme Jepang tahun 1910-1945.³⁴ Saat Jepang mengalami kemunduran pada Agustus 1945, otoritas Jepang memberikan kuasa kepada Yo Un Hyong untuk membentuk panitia persiapan penetapan negara baru (*the Preparatory Commiteefor Establishing a New State*), yang disebut Konjun, guna memposisikan kembali apparatus negara Jepang. Pada 8 September 1945, Republik Rakyat Korea dirayakan. Negara baru mengakomodasi perluasan eksplosif *civil society*. Komunis dalam hal ini memainkan peran instrumental dalam organisasi sosial, mereka tampil sebagai pimpinan sejumlah gerakan perjuangan bawah tanah melawan imperialism Jepang. Pada 15 Februari 1946, sejumlah organisasi sosial yang berbeda-beda telah mengalami perkembangan mencapai jumlah 35 organisasi. Kelompok-kelompok ini tidak serta-merta berada

³³ Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions, dalam Muthiah Alagappa, Civil Society and Politicalhlm.138-140*

³⁴ Imperialisme Jepang telah mendorong terbentuknya negara kolonial yang *powerful* dalam berhadapan dengan masyarakat Korea. Pemerintah kolonial memiliki kekuasaan tak terbatas, kuat, dan bagus organisasinya dibanding dengan sistem pemerintahan Korea asli prakolonial yang monarkhi. Imperialisme Jepang terkenal resistan, militant, dan oposisional terhadap *civil society*. Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions, dalam Muthiah Alagappa, Civil Society and Politicalhlm.140*

di bawah pengaruh Komunis, tetapi justru dicirikan dengan tingginya tingkat fungsi dan otonominya³⁵.

Munculnya pemerintahan di bawah angkatan bersenjata Amerika di Korea membawa bencana tersendiri bagi perkembangan organisasi *civil society*. Untuk memutus kedekatan hubungan antara *Civil society* dengan komunis, pemerintah militer Amerika secara sistematis merepresi dan mendepolitisasi *civil society*. Perang dinginpun terjadi saat kelompok *Civil society Civil society* yang dipelopori oleh the National Council of Labour Unions dan The National Federation of Peasant Unions merespon kebijakan opresif pemerintahan militer Amerika dengan demonstrasi dan perlawanan keras.³⁶

Periode pertengahan 1980, Korea Selatan kembali jatuh ke dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Konstitusi diamandemen untuk mengeliminasi pembatasan kekuasaan presiden, presiden menempati posisi dominan, pemilu berjalan tidak fair, kelompok kepentingan menjadi kaki tangan, keberadaan media dikontrol ketat oleh negara.

Pada Juni 1987, pimpinan partai berkuasa Roh Tae Woo mengajukan delapan paket demokratisasi yang banyak menadopsi tuntutan partai oposisi dan kelompok-kelompok gerakan sosial. Hasilnya, sejumlah perubahan signifikan muncul dalam politik Korea Selatan sejak 1987. Seiring dengan perluasan kebebasan dan kekuatan sipil, Korea Selatan kian berhasil melewati transisi dari kebijakan otoritarian menuju demokrasi, dan bahkan sekarang menjadi salah satu negara Asia yang mampu mengkonsolidasikan demokrasi.

b. *Civil Society*, Transisi, dan Konsolidasi Demokrasi

Dinamika politik di Korea Selatan dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu periode demokratisasi pertama (1956-1961), mahasiswa dan intelektual urban melakukan perlawanan terhadap represi dan korupsi yang dilakukan rezim otoritarian Syngman Rhee. Mahasiswa bersama partai oposisi progresif juga melakukan kampanye demokrasi. Periode demokratisasi kedua (1973-1980), sejumlah asosiasi nasional terdiri dari

³⁵ Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Politicalhlm.141*

³⁶ Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Politicalhlm.142*

kalangan intelektual, jurnalis, professional dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam melawan rezim otoriter Park Chung Hee. Sedangkan pada periode demokratisasi ketiga(1984-1987), aliansi *Civil society* prodemokrasi terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan gereja serta mendapat sokongan dari kelas menengah. Kelompok-kelompok *Civil society* disatukan oleh asosiasi yang mencakup organisasi-organisasi regional dan nasional sehingga keberadaannya semakin kuat dan luas. Usaha yang dilakukan dalam melakukan perlawanan terhadap rezim otoritarian semakin sistematis, dan sekaligus menegosiasikan tuntutan demokrasi yang mereka perjuangkan³⁷.

Di bawah rezim Chun Doo Hwan, represi negara terhadap *Civil society* berlangsung selama empat tahun (1980-1983)³⁸. Bersamaan dengan coup militer dan kekerasan terhadap gerakan prodemokrasi di Kwangju pada Mei 1980.³⁹

Akhir 1983, penindasan Chun terhadap *Civil society* berkurang secara signifikan, rezim otoritarian memutuskan untuk meliberalisasi kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada para professor dan mahasiswa kembali ke kampus, dan menarik polisi militer dari kampus, dan merehabilitasi tahanan politik. Kebijakan baru pemerintahan Chun ini membawa implikasi terhadap bangkitnya kembali *civil society*. Pada periode itu pula, para politisi oposisi membentuk *the New Korea Democratic Party* (NKDP : *Sinhan Minjung*) pada Januari 1985. Politik otoritarian di Korea Selatan telah jatuh, dan transisi demokrasipun mulai tumbuh, ditandai munculnya formasi NKPD beserta penajajaran pemilihnya dengan kelompok *civil society*.⁴⁰

Sementara itu, gerakan prodemokrasi Korea Selatan dalam kurun waktu 1886-1987 mengambil tiga bentuk yang berbeda.

³⁷ Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Politicalhlm.143-144*.

³⁸ Tahun 1980-1983 tersebut nyaris tidak ada barisan oposisi yang nyata dalam politik Korea Selatan. Partai-partai politik dikontrol secara ketat oleh rezim otoritarian. Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Politicalhlm.145*.

³⁹ Rezim otoritarian melakukan pembersihan terhadap ribuan pejabat publik, politisi, professor, guru, pastor, jurnalis, dan mahasiswa atas dasar tuduhan korupsi, anjuran demonstrasi anti pemerintah dan usaha pemberontakan.

⁴⁰ Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Politicalhlm.145*.

Pertama, mulai awal 1986, para aktivis agama menuntut revisi perundang-undangan secara cepat. Para pastor Protestan membuat pernyataan yang intinya diperlukan *drafting* terhadap konstitusi yang menjamin pemilihan presiden, hak azasi manusia, dan keadilan ekonomi. Kardinal Kim Su Hwan, awal Mei 1986 mengumumkan bahwa demokratisasi adalah jalan terbaik untuk membuat perdamaian bersama Tuhan. *Kedua*, kelompok oposisi NKPD berkampanye populer untuk mengumpulkan sepuluh juta tandatangan guna mendukung diadakannya revisi undang-undang. *Ketiga*, kelompok *Civil society* bergabung dengan NKDP mensponsori sejumlah rapat umum massa dalam mendorong demokratisasi. Koalisi demokrasi besar yang digalang kelompok *Civil society* dan partai oposisi sukses memobilisasi warga masyarakat orea dari seluruh lapisan kehidupan, dengan slogan “turunkan rezim otoritarian militer dan bangkitlah pemerintahan demokratik”.

Akhirnya, pada 29 Juni 1987, mobilisasi massa secara besar-besaran memenuhi hampir seluruh sudut kawasan di Korea Selatan, rezim otoritarian mengumumkan sebuah konsesi yang cukup dramatic guna memenuhi tuntutan kelompok *Civil society* dan partai oposisi. *emerintah juga mengadopsi tuntutan kelompok *Civil society* untuk diadakan pemilihan presiden secara langsung. Sebuah keberhasilan yang cemerlang telah diraih oleh kelompok-kelompok *Civil society* yang berbeda-beda di Korea Selatan telah memainkan peran krusial dalam mendobrak rezim otoritarian dan melahirkan sebuah era transisi menuju demokrasi⁴¹

SIMPULAN

Dari beberapa peneliti mengenai dinamika perkembangan *Civil society* di beberapa negara di Asia dalam perannya menuju demokratisasi, menyiratkan suatu perbedaan kerangka teoritik jika dibandingkan dengan perspektif teoritik *Civil society* di Eropa yang dikemukakan Arato. Konsep *Civil society* yang berkembang di Asia

⁴¹ Sunhyuk Kim, *South Korea: Confrontational Legacy Democratic Contributions*, dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Politicalhlm.147*.

memang berasal dari Barat, terutama Eropa, hanya saja *Civil society* yang berkembang di Asia, dipastikan dalam perkembangannya sarat dengan perdebatan- dan kemudian yang banyak dijadikan acuan para peneliti tidaklah sama dengan pengalaman Eropa. *Civil society* di Asia tidak mutlak berhadap-hadapan dengan negara, ataupun diidentikkan dengan kelompok yang melakukan perlawanan terhadap negara yang otoriter. Dari hasil penelitian di Asia seperti tertulis di dalam makalah ini, fenomena *Civil society* di Asia itu menampakkan karakternya yang lebih luwes, daripada lugas/ tegas. Adakalanya *Civil society* bisa bergandengan tangan dengan negara, meski negara otoriter, namun sering kali pula *Civil society* berhadap-hadapan dengan negara.

Banyak pengalaman negara-negara di Asia menunjukkan fakta tentang keberadaan *Civil society* yang menimbulkan berbagai dampak, tidak hanya membawa sisi terang (dampak positif), namun juga bisa membawa sisi gelap (berdampak negative). *Civil society* berdampak positif manakala pada periode tertentu tumbuh dan berkembang aneka asosiasi dan organisasi di luar negara dan secara kritis mereka bisa melakukan fungsi kontrol terhadap negara dalam proses-proses perubahan sosial. Sebaliknya, jika dalam periode tertentu *Civil society* kelihatannya tumbuh dan berkembang pesat, namun mereka lemah dan bahkan di dalam tubuh *Civil society* sendiri terlibat dalam konflik berkepanjangan, maka dalam hal demikian *Civil society* cenderung memberikan dampak negative bagi perubahan politik yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, Muthiah (ed.). 2004. *Civil society and Political Change in Asia : Expanding and Controlling Space Democratic*. Stanford. California : Stanford University Press.
- Arato, Andrew. 2000. *Civil Society, Constitution, and Legitimacy*. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
- Budiman, Arif. 1990. *State and Civil society in Indonesia*. Australia : enter of Shoutheast Asian Studies.
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil society and Political Theory*. Cambridge, Mass : MIT Press.
- Gramsci, Antonio. 1971. *The Selections From the Prison Notebooks*. London : Lawrence and Wishart.

- Hall, John A. 1995. In Search of Civil Society, dalam Johan A.Hall (ed.). Civil Society: Theory, History, Comparison. Cambridge, Massachussets: Polity Press.
- Haynes, Jeff. 2000. Demokrasi & Masyarakat Sipil Dunia Ketiga : Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggirkan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil society Jakarta: Erlangga.
- Huntington, Samuel P. 2004. Democracy's Third Wave, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed.) The Global Resurgence of Democracy, Baltimore and London: The Johns ty Press.
- Muukkonen, Martti. 2009. Framing the Field: Civil society and Related Concepts. dalam Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Mar 30. Sage Publication.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Tusalem, Rollin F. 2007. A Boon or a Bane ? The Role of Civil society in Third- and Fourth-Wave Democracies. dalam International Political Science Review. 28; Sage Publication.
- Uhlen, Anders. 2009. Which Characteristics of Civil society Organizations Support What Aspects of Democracy ? Evidence from Post-Communist Latvia. dalam International Political Science Review. 30. Sage Publication.